



## Problematika Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi

Firman Amir

ISDIK Kie Raha Maluku Utara

Received: 22 November 2023  
Revised: 30 November 2023  
Accepted: 8 Desember 2023

### Abstract

*Education is the most important means for humanizing humans to become completely independent human beings, education in the broadest sense is formal education (elementary school, middle school, high school, up to college), non-formal (education in the community), and informal education (education in the family environment). All of this is a process carried out by humans in order to socialize and adapt to the culture they follow. Education is a form of effort to maintain the existence of human life and culture. In other words, education is one of human culture's strategies to maintain the existence of human life itself. Viewed from an epistemological perspective, humans are intellectual creatures who can use their minds freely to seek the truth in their knowledge (truth). And from an ethical perspective, humans are creatures who have a conscience that allows them to behave and act in accordance with the truth they adhere to, their decisions and actions. If we analyze it together, it turns out that the problem of education in Indonesia is not only a matter of curriculum structuring, teacher professionalism, output of educational institutions, educational paradigms, and internal problems in the administration of other educational institutions. But more than that, there are external factors that also have a big influence on Indonesian education, namely poor people who cannot afford to go to school, disorientation of government policies, market-oriented education, and the vortex of globalization that we are currently facing.*

**Keywords:** *Globalization, Education, and Increasing human resources*

(\*) Corresponding Author:

[firmanamir73@gmail.com](mailto:firmanamir73@gmail.com)

**How to Cite:** Amir, F. (2024). Problematika Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 845-855. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10494540>

## PENDAHULUAN

Menelaah posisi manusia menurut filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sedangkan sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Dilihat dari sisi jumlah kebanyakan manusia yang tertindas saja ini menunjukkan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak berimbang dan tidak adil. Persoalan itu yang disebut Freire sebagai “situasi penindasan”. Bagi Freire situasi penindasan apapun namanya dan alasannya adalah tidak manusiawi dan menafikkan harkat kemanusiaan (*dehumanisasi*).

Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian, terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam “kebudayaan bisu” (*submerged in the culture of silence*). Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakikat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya, (Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015).

Peran pendidikan di zaman modern sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih-lebih di zaman ini pendidikan masih diakui sebagai prasyarat utama seorang manusia bisa menemukan perubahan, prestasi dan produktivitas serta kreatifitas dalam hidupnya. Seorang manusia merasa hampa dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal, non formal, dan informal.

Fungsi pendidikan masih sangat luas dalam artian untuk pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa generasi muda agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan jalan kebaikan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun seorang manusia bisa belajar berpendidikan. Pendidikan juga merupakan aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan tetap ada dan berkembang sepanjang hayat.

## **PEMBAHASAN**

Lodge mengatakan bahwa “hidup adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup”. Dengan demikian cakupan wilayah pendidikan meliputi seluruh umat manusia, sepanjang hidup manusia. Perubahan-perubahan dari proses pendidikan yang meliputi aspek-aspek yang sangat luas akhirnya sulit diukur, jika dapat diukur itu hanya sebagian kecil dari aspek yang sangat luas. Hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup sepanjang hayat maka tiap-tiap warga negara dikenai wajib belajar yang disebut *compulsory education* sebagai perwujudan urgensinya pendidikan bagi manusia. *Compulsory education* dari sisi-sisi lain untuk mempersiapkan generasi bangsa negara agar mampu melakukan *adjustment* dengan perkembangan dunia saat ini yang telah berkembang dengan cepat, (Asrowi, 2017)

Sudah jelas bahwa semua manusia Indonesia harus bisa berpendidikan dengan baik, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena kita sudah harus mengacu pada satu konsep pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup, sehingga pendidikan bukan hanya pada ruang formal saja seperti sekolah dan perguruan tinggi tetapi pendidikan ada di mana-mana, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat tempat kita hidup dan bersosialisasi, maupun lingkungan keluarga.

Pendidikan punya peran yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan SDM yang berkualitas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Baik berkualitas secara intelektual maupun moral. Pendidikan merupakan rancangan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan masyarakat luas. Selain itu pendidikan juga mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya, tetapi juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya, ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Suatu bangsa menjadi kuat, perkasa, dan berjaya serta menguasai bangsa-bangsa lain dengan sistem pendidikannya yang kuat dan baik, serta pelaksanaannya. Fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara dan bangsa

khususnya dalam melestarikan kepribadian dan kebudayaan bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, (Andi Saputra, 2014)

Jika kita urai bersama ternyata persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya masalah penataan kurikulum, profesionalitas guru, out-put lembaga pendidikan, paradigma pendidikan, dan persoalan internal penyelenggaraan lembaga pendidikan lainnya. Tetapi lebih dari itu ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh pada pendidikan Indonesia yaitu rakyat miskin hingga tidak mampu sekolah, disorientasi kebijakan pemerintah, pendidikan *market oriented*, dan pusaran arus globalisasi yang saat ini kita hadapi.

Rumusan paradigma pendidikan tentu jangan sampai lemah karena terseret arus globalisasi. Sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan dengan memaksa *out-put* untuk di terjunkan ke dunia pasar kerja. Karena globalisasi tidak bisa di bendung maka sikap kita adalah harus beradaptasi secara arif tanpa harus menolaknya. Kekuasaan negara yang berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi global inilah yang menimbulkan dampak negatif dalam segala sektor negara termasuk dalam hal ini adalah dunia pendidikan, (Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015).

#### **Pendidikan Sebagai Lahan Komoditi, Ancaman Bagi Kemanusiaan**

Salah satu tujuan dan amanat dari reformasi tahun 1998 ketika runtuhnya rejim otoriter orde baru adalah teraksesnya pendidikan secara merata kepada seluruh manusia Indonesia, tidak peduli apakah mereka berasal dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Semua manusia Indonesia harus memiliki dan menikmati dunia pendidikan secara layak, arif, dan bijaksana. Maka pemerintah Indonesia dalam konteks ini memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kemudahan terhadap seluruh masyarakat agar bisa memperoleh pendidikan dengan baik, terencana dan terarah.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan pasal (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003 pasal 49 ayat (1) dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), (Moh. Yamin, 2013).

Problematisa pendidikan yang kita hadapi sekarang dan patut dipertanyakan adalah benarkah pendidikan sudah bisa dinikmati dan diakses dengan baik dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga sangat terjangkau? Apakah pemerintah sudah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diatas secara tegas, konsisten, berani, jujur, serta adil dan bijaksana. Realitas saat ini membuktikan bahwa biaya pendidikan sangat mahal, pendidikan bukan lagi barang murah yang bisa dibeli dengan nilai rupiah sangat murah.

Pendidikan sangat sulit dinikmati oleh rakyat miskin yang dimiskinkan oleh struktur dan sistem para pejabat bangsa yang korup.

Sejarah telah mencatat bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dari suatu negara merupakan andalan utama untuk pembangunan negara tersebut. Meskipun suatu negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti minyak bumi, mineral, hutan, kekayaan laut, obyek wisata, dan lain-lain namun tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, maka negara tersebut cenderung akan tetap saja berada pada posisi terbelakang. Dalam kaitan dengan hal ini, masalah peningkatan kualitas SDM merupakan masalah yang menonjol dan perlu didiskusikan secara serius, terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, (Heru Nugroho, 2011).

Saat ini kita telah memasuki suatu zaman baru yang ditandai dengan menguatnya ideologi pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman globalisasi. Kebudayaan umat manusia untuk mempertahankan eksistensi hidup yang lebih baik melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan ternyata bagi sebagian manusia dapat digunakan untuk mengakumulasi kekayaan dan mendapatkan keuntungan.

Bagaimana mungkin kebudayaan manusia yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan utama untuk eksistensi hidup dan berperadaban yang telah direproduksi berabad-abad selama ini, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi atau bisa dikatakan pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis. Tetapi apa sesungguhnya yang mendorong terjadinya komoditisasi pendidikan sebagai lahan bisnis ini?

Pendidikan diperlakukan sebagai lahan bisnis diperkuat sejak ditandatanganinya kesepakatan GAAT, di mana dunia secara global telah memihak pada kepentingan pasar bebas. Hal itu dilakukan demi membuka peluang bagi Trans National Corporations (TNCs) untuk ekspansi. Salah satu usaha strategis mereka adalah memengaruhi kebijakan negara-negara selatan untuk melicinkan “jalan” bagi TNCs untuk beroperasi. Strategi dan proses globalisasi pasar bebas yang diperjuangkan oleh para aktor utama, globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia, IMF, melalui kesepakatan yang di buat di WTO, sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas” atau melalui jalur globalisasi.

Itulah alasan mengapa Neo-Liberal ekonomi tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. Keputusan individual atas *interest* pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari *invisible hand* sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Dan pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan *trickle down* kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu, sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Pendirian ini pada prinsipnya tidak bergeser dari paham Liberalisme. Paham inilah yang sejak lama berusaha untuk membatasi peran pemerintah dan lebih memberi kesempatan pada perusahaan-perusahaan swasta untuk menjadi aktor dalam bidang ekonomi di bawah situasi persaingan bebas yang diciptakan oleh gagasan “pasar bebas”. Biarkan pasar menentukan harga. Akibat dari pendirian pasar bebas tersebut ada sejumlah akibat yang nantinya akan berpengaruh terhadap visi pendidikan dan

akan memaksa komodifikasi pendidikan terjadi, (Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015).

Gagasan manusia untuk menjadikan pendidikan sebagai eksistensi dan budaya manusia yang berperadaban dan bermartabat, saat ini telah mengalami pergeseran orientasivisi maupun ideologi ketika ada segelintir manusia yang menguasai dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi sehingga kebijakan komoditas pendidikan berakibat menjadi ancaman bagi eksistensi manusia sendiri.

Adanya sejumlah sekolah mulai tingkat dasar hingga tingkat atas yang menetapkan biaya pendidikan sangat tinggi setiap tahun ajaran baru sehingga mencekik rakyat kecil yang tidak punya kemampuan ekonomi, membuktikan bahwa pendidikan sudah menjadi barang langka dan sulit dijangkau oleh rakyat miskin. Pendidikan telah diperjualbelikan sehingga hanya kelompok yang berkantong tebal saja, yang memiliki kekayaan berlimpah kemudian bisa menikmati pendidikan. Anak-anak orang kaya berkantong tebal akan melenggang bisa bersekolah, berbahagia mengenyam dunia pendidikan dan pintar. Sedangkan anak-anak orang miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan sangat pas-pasan, berpikir sangat susah terkadang tidak cukup membiayai kebutuhan perutnya, maka cita-cita dan harapan mendapatkan pendidikan hanya se-buah impian yang tidak akan bisa dibuktikan secara konkrit.

Yang jelas, adanya pendidikan yang kemudian diserahkan kepada ekonomi pasar yang menghendaki penguasaan ekonomi kepada individu-individu korporasi, maka ini akan menyulitkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah guna mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu dan berkualitas. Indonesia yang sudah masuk dalam lingkaran neoliberalisme pasca menggelar kebijakan otonomi pendidikan telah menyebabkan dunia pendidikan menjadi perdagangan bebas. Harganya sangat meroket tinggi sehingga sulit dinikmati oleh rakyat miskin. Termasuk pula dengan dunia perguruan tinggi yang juga cukup tinggi dalam mematok biaya pendidikannya,

Itulah problematika pendidikan yang mengarah pada komersialisasi pendidikan yang kita hadapi saat ini, jika benar-benar pemerintah melepaskan tangan dan menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sistem pasar dan otonomisasi pendidikan tinggi maka yang terjadi adalah lembaga pendidikan akan menjadi komoditi lahan bisnis bagi para pengusaha dan dampaknya adalah pemiskinan secara struktural semakin masif terjadi di bangsa Indonesia, yang miskin semakin melarat dan yang kaya bergelimang harta hidup di atas penderitaan mayoritas rakyat Indonesia yang tertindas.

### **Bongkar Pasang Kurikulum**

Tidak mudah untuk menyatukan persepsi mendefinisikan kurikulum secara tepat dan dapat berlaku umum, karena dalam membuat definisi kurikulum tidak bisa terlepas dari pemahaman tentang hakikat dasar dan tujuan dari pendidikan. Sementara pemahaman para ahli pendidikan tentang hakikat pendidikan berbeda-beda tergantung pada filosofi yang dianut serta cara pandang. Kaitan definisi kurikulum dengan pendidikan ini disebabkan karena kurikulum adalah bagian dari masalah pendidikan dan kurikulum adalah salah satu sub-sistem dari pendidikan.

Kurikulum adalah sub-sistem dari sistem pendidikan yang terdiri dari: (1). *Tujuan*, tujuan merupakan batasan dari hal-hal yang hendak dicapai. Baiknya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu usaha perlu dikonkritkan terlebih dahulu sebelum usaha tersebut mulai, (2). *Pendidik*, pendidik adalah orang yang melaksanakan pendidikan, orang ini biasa disebut guru atau dosen. Orang tersebut sebagai pihak yang mendidik dengan norma-norma, pihak yang turut membentuk anak, pihak yang memberikan anjuran, pihak yang terlibat dalam menghumanisasi anak, memiliki berbagai macam pengetahuan dan kecakapan, (3). *Peserta didik*, sasaran dari pendidikan adalah peserta didik, peserta didik dapat dikatakan sebagai pihak yang di didik, dipimpin, diarahkan, dan diberi berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik. Peserta didik juga bisa dikatakan sebagai pihak yang dihumanisasikan yang biasa disebut pelajar atau mahasiswa, (4). *Alat (hard ware dan soft ware)*, alat pendidikan adalah sesuatu apapun yang membantu terlaksananya proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuannya, baik berupa benda ataupun bukan berupa benda, seperti sarana dan prasarana, finansial, media pembelajaran, kurikulum dan sebagainya, (5). *Manajemen*, manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan seni atau ilmu dalam mengelola proses pendidikan, (6). *Metode*, metode adalah cara yang ditempu pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran, (7). *Lingkungan*, lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu, sesuatu itu mungkin berasal dari dalam (internal) atau dari luar (external) diri individu, (Kholid Musyaddad, 2014).

Berdasarkan pemikiran sistemik di atas, maka kurikulum adalah bagian dari atau salah satu unsur dari sistem pendidikan yang perannya sangat besar dalam menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Jika kurikulum pendidikan tertata dengan baik dan benar maka kualitas pendidikan yang diharapkan untuk peningkatan SDM bisa tercapai dengan sangat sempurna.

Ketika bangsa Indonesia memulai rezim transisi dari orde baru ke reformasi, ini adalah kali keempat kurikulum dirubah, ditelaah, dievaluasi dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, dan Kurikulum 2013 yang masih berada dalam tahap evaluasi. Beberapa lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan secara langsung Kurikulum 2013 lebih dari satu tahun diminta meneruskan pelaksanaan Kurikulum 2013 di bawah monitoring dan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama satu semester diminta untuk kembali melaksanakan Kurikulum 2006. Dalam masa pemerintahan yang baru ini, pertanyaan yang selalu muncul dalam forum publik adalah soal keberlanjutan pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah, “apakah pemerintah memilih melanjutkan pekerjaan pelaksanaan Kurikulum 2013, kembali menggunakan Kurikulum 2006 ataukah merumuskan Kurikulum baru yang lain?.

Di kaji dari sejarah perjalanan pendidikan di republik ini, dunia pendidikan terus menerus berada dibawah ketiak kepentingan penguasa. Apapun yang diinginkan oleh penguasa, maka itulah yang akan terjadi. Ini kemudian dibuktikan dengan pergantian kurikulum pendidikan yang terjadi secara berulang-ulang, sebut saja dari kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan 2013.

Untuk apa harus dilakukan perubahan kurikulum? Terlepas apapun jawabannya, memang itulah potret dunia pendidikan kita yang selalu tak pernah bebas nilai, pendidikan tidak bisa lepas dari kepentingan sektoral tertentu. Pendidikan selalu ditopangi semangat sektoral dan ini selanjutnya membuat tujuan pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian gagal ditunaikan dengan sedemikian rupa. Seharusnya pendidikan ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, inipun tidak mungkin terjadi.

Sangat sulit bangsa ini memajukan kualitas pendidikan, jika yang selalu diperbincangkan hanya sebatas persoalan bongkar pasang kurikulum an- sich. Diakui maupun tidak, bongkar pasang kurikulum akan menegasikan substansi terpenting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya, yakni memanusiaikan manusia. Bongkar pasang kurikulum hanya akan lebih dekat kepada ranah bentuk (form) bukan isi (content). Bongkar pasang kurikulum justru menciptakan ketidakjelasan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa diatas segala-galanya. Bagaimana akan mampu memperjelas tujuan pendidikan sedangkan bongkar pasang kurikulum dari waktu ke waktu terus menerus dipertontonkandengan sedemikian rupa.

Cara berpikir penguasa dalam dunia pendidikan selalu berjaln kelindan dengan bagaimana ideologi dari penguasa kemudian dapat dimanifestasikan dalam pendidikan. Praksisnya adalah para generasi bangsa yang berada dalam kelas kemudian akan mudah diarahkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai mesin paling seksi untuk melakukan doktrinasi-doktrinasi penguasa, sepertinya tetap sangat primadona untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa sepanjang masa. Pendidikan sangat strategis untuk memasukkan nilai-nilai budaya tertentu yang merupakan bagian dari kepentingan penguasa.

Mengutip pendapat Michel Foucult, pengetahuan tak lepas dari kekuasaan. Siapa yang berkuasa, maka akan semakin mudah mempermainkan pengetahuan untuk kepentingan penguasa. Hal tersebut sama halnya dengan pendidikan. Siapa yang berkuasa, maka ia akan lebih mudah memperlakukan pendidikan sebagai proyek kepentingan penguasa dan kekuasaan. Pendidikan sudah tidak bebas nilai namun sudah teracuni dan diracuni virus-virus kekuasaan hegemonik, mengutip pendapat Antonio Gramsci, (Moh. Yamin, 2013).

Diakui ataupun tidak, masih sibuknya penguasa negeri ini melakukan perombakan kurikulum sebetulnya tanpa disadari merupakan proyek kebijakan politik penguasa. Upaya mereka untuk selalu melakukan bongkar pasang kurikulum yang saat ini sedang dilakukan bisa diibaratkan sebagai kelinci percobaan. Pengertian kelinci percobaan adalah penguasa negeri ini sedang mencoba-coba melakukan rumusan konsep tentang bagaimana masa depan pendidikan harus dirancang-bangun. Apakah rumusannya lebih baik atau buruk, itu merupakan persoalan “belakangan”. Yang terpenting adalah mereka berusaha “bekerja dan bekerja”.

Patut dipertanyakan adalah apakah rumusan pendidikan yang sudah dispakati di rezim sebelumnya tidak tepat atau memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bangsa kita tidak akan segera merdeka dan bebas dari keterbelakangan pendidikan apabila setiap rezim penguasa yang berkuasa selalu mengagahi pendidikan sesuai dengan kepentingan politik maing-masing. Penguasa negeri ini tidak memiliki kesadaran sangat tinggi bahwa sesungguhnya

memperlakukan pendidikan sesuai dengan kepentingan sektoral akan membangkrutkan kemajuan peradaban bangsa.

Meletakkan kembali pendidikan sesuai dengan tujuan sangat mulia guna mengantarkan bangsa ini menjadi berbudaya, beradab, serta berperadaban tinggi dan mulia adalah hal niscaya. Kondisi ini tentu semakin mempetegas bahwa pendidikan kita tidak akan mengalami kemajuan luar biasa dari rejim penguasa di setiap jaman. Pasalnya, adanya perubahan kurikulum yang terus menerus akan membuat tujuan pendidikan tidak jelas. Bagaimana bangsa ini akan semakin maju ketika kurikulum selalu dirubah sesuai dengan kepentingan penguasa. Selera penguasa negeri ini dalam meramu kurikulum akan melahirkan cara pandang berbeda dalam dunia pendidikan. Selera penguasa dalam merubah kurikulum akan membuat perjalanan pendidikan menjadi tidak cepat sampai tujuan yang dicita-citakan. Sebab selalu terhambat pada konsep yang dijalanannya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu di setiap rejim yang berkuasa.

### **Problematika Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi adalah bentuk pemindahan tanggungjawab, kekuasaan, wewenang dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (e) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah mengubah editing pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik menuju suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu desentralisasi pendidikan dapat mendekatkan proses pendidikan kepada masyarakat, (Yatimin, 2009).

Desentralisasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia. Model pendidikan yang selama ini di kelola dalam suatu iklim dan cara pandang yang birokratik dan sentralistik di anggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan kualitas pendidikan.

Salah satu amanat reformasi dalam dunia pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang berbasis lokalitas-lokalitas sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat dalam dunia pendidikan harus sebangun dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, bukan lagi diseret kepada kebijakan pusat yang sentralistik dan jarang memperhatikan potensi daerah. Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan salah satu tema pokok reformasi politik Indonesia pasca runtuhnya rejim orde baru Soeharto.

Namun yang patut kita pertanyakan adalah benarkah desentralisasi pendidikan, baik kebijakan pendidikan, penentuan ujian akhir, kurikulum pendidikan dan lain seterusnya betul-betul diserahkan kepada daerah dengan tetap memegang teguh tujuan pendidikan nasional? Desentralisasi pendidikan pasca reformasi dengan segala bentuknya tidak memiliki perencanaan dan tujuan yang

jelas dan terarah. Kebijakan ini hanya lebih dilihat sebagai buah kekegetan politik ketimbang keinginan untuk mengatur administrasi pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan desentralisasi setengah hati ketika dilapangan masih terjadi tarik menarik antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kita merasakan adanya ketidakpuasan pemerintah pusat dalam menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah dan kita merasakan adanya ketidaksiapan secara kelembagaan maupun pelaksanaan kebijakan di daerah. Beberapa kasus menunjukkan semua serba kacau dan carut-marut. Sebut saja contoh yang paling telanjang di depan mata kita adalah penentuan ujian kelulusan siswa baik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat yang sangat rancu.

Sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, pemerintah menetapkan bahwa kelulusan itu meliputi tiga hal. Pertama adalah evaluasi belajar siswa yang ditentukan sekolah masing-masing. Kedua adalah perilaku siswa. Ketiga adalah hasil akhir yang dijalani melalui Ujian Akhir Nasional (UN).

Secara ideal, hal itu sangat menjadi harapan. Namun dalam konteks kenyataan, kendatipun para siswa sudah lulus baik poin pertama maupun poin ke duaakan tetapi gagal pada poin ke tiga, maka mereka dinyatakan gagal total (tidak lulus). Akan tetapi apabila mereka lulus pada poin ke tiga, sedangkan poin pertama dan ke dua gagal, mereka tetap dinyatakan lulus sekolah. Oleh karenanya, mencermati persoalan tersebut, pemerintah dalam konteks desentralisasi kebijakan pendidikan yang digelarnya pun sangat tidak konsisten. Diatas kertas, pemerintah berbicara secara lantang untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah supaya bisa menjalankan pendidikan sesuai potensi kedaerahnyadengan tetap berpegang teguh pada prinsip tujuan pendidikan nasional namun secara praksis, pemerintah menarik kembali kebijakannya itu. Sehingga alih-alih pendidikan betul-betul dijalankan oleh daerah-daerah masing-masing, hal tersebut tidak benar dalam implementasinya, (Moh. Yamin, 2013).

Artinya, pemerintah pusat belum memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk *men-design* pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokalitas. Sehingga ini mengesankan desentralisasi pendidikan yang buruk. Dengan kata lain, pusat masih mendominasi terhadap daerah. Desentralisasi pendidikan yang didengung-dengungkan amanat reformasi belum mampu dijalankan secara serius oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan desntralisasi pendidikan yang kini digulirkan sayangnya tidak berbanding lurus antara harapan dan kenyataan (*de soulen de saien*). Yang pasti, desentralisasi pendidikan belum tepat disebut kebijakan pendidikan yang tepat sasaran sebab hasil pelaksanaannya selama ini tidak menunjukkan prestasi cukup luar biasa karena masih banyak kebijakan pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat tanpa melihat kondisi daerah, sehingga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokalitas belum tercapai dan terlaksana dengan baik.

Semoga ke depan lembaga pendidikan kita semakin maju dalam hal peningkatan perbaikan kualitas pendidikan maupun keberpihakan kebijakan pendidikan pada rakyat ekonomi kelas bawah sehingga bisa memudahkan anak negeri dalam melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi, agar

bangsa kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat, berbudaya, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era globalisasi.

## **KESIMPULAN**

Apabila pendidikan kemudian diserahkan kepada pasar maka ketika berbicara pasar, yang *berduit* saja, yang bisa membeli pendidikan sedangkan yang miskin secara ekonomi, merekapun menjadi masyarakat terbuang dan sangat kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Sebab dalam arus globalisasi perdagangan bebas dan kompetisi bebas tersebut dianggap merupakan jalan terbaik guna mengembangkan ekonomi nasional. Apa yang menjadi prinsip dasar neoliberalisme sebenarnya diawali dengan karakter kebijakan pasar bebas yang memacu perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab pribadi dan upaya kewiraswastaan serta menyingkirkan birokrat dan parasit pemerintah. Biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan.

Itulah problematika pendidikan yang mengarah pada komersialisasi pendidikan yang kita hadapi saat ini jika benar-benar pemerintah melepaskan tangan dan menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sistem pasar dan otonomisasi pendidikan tinggi maka yang terjadi adalah lembaga pendidikan akan menjadi komoditi lahan bisnis bagi para pengusaha dan dampaknya adalah pemiskinan secara struktural semakin masif terjadi di bangsa Indonesia, yang miskin semakin melarat dan yang kaya bergelimang harta hidup di atas penderitaan mayoritas rakyat Indonesia yang tertindas

Diakui maupun tidak, masih sibuknya penguasa untuk selalu melakukan pengotak-atikan kurikulum sebetulnya tanpa disadari merupakan proyek politik penguasa. Adanya upaya melakukan bongkar pasang kurikulum yang saat ini sedang dilakukan penguasa pun dapat diibaratkan sebagai kelinci percobaan. Pengertian kelinci percobaan adalah penguasa sedang mencoba-coba melakukan rumusan konsep tentang bagaimana masa depan pendidikan harus dirancang-bangun. Apakah rumusannya lebih baik atau tidak, itu merupakan persoalan "belakangan". Yang terpenting adalah penguasa berusaha "bekerja dan bekerja". Pertanyaannya adalah apakah rumusan pendidikan yang sudah dispakati di rezim sebelumnya adalah tidak tepat atau memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selera penguasa dalam merubah kurikulum akan membuat perjalanan pendidikan menjadi tidak cepat sampai tujuan. Sebab selalu terhambat pada konsep yang dijalannya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Kita merasakan adanya ketidakpuasan pusat dalam menyerahkan kewenangannya kepada daerah dan kita merasakan adanya ketidaksiapan secara kelembagaan maupun pelaksanaan kebijakan daerah. Beberapa kasus menunjukkan semua serba kacau dan carut-marut. Sebut saja contoh yang paling telanjang di depan mata kita adalah penentuan kelulusan siswa baik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat yang sangat rancu. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan bahwa kelulusan itu meliputi tiga hal. Pertama adalah evaluasi belajar siswa yang ditentukan sekolah. Kedua adalah perilaku siswa. Ketiga adalah hasil akhir yang dijalani melalui Ujian Nasional (UN). Secara ideal, hal itu sangat menjadi harapan. Namun dalam konteks kenyataan, kendatipun para siswa sudah lulus baik poin pertama maupun poin ke

dua akan tetapi gagal pada poin ke tiga, maka mereka dinyatakan gagal total (tidak lulus). Akan tetapi apabila mereka lulus pada poin ke tiga, sedangkan poin pertama dan ke dua gagal, mereka tetap dinyatakan lulus sekolah. Oleh karenanya, mencermati persoalan tersebut, pemerintah dalam konteks desentralisasi kebijakan pendidikan yang digelarnya pun sangat tidak konsisten. Diatas kertas, pemerintah berbicara secara lantang untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah supaya bisa menjalankan pendidikan sesuai potensi kedaerahannya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tujuan pendidikan nasional namun secara praksis, pemerintah menarik kembali kebijakannya itu

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asrowi. *Meretas Solusi Problema Pendidikan Dalam Perspektif Global*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Dies Natalis Ke 37 Universitas Sebelas Maret.
- Andi Saputra, (2014) *Pendidikan Yang Menindas, Tinjauan Kritis Terhadap Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Terampil, Vol. 2. Nomor 2.
- Kristeva Santoso Nur Sayyid. (2015) *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Musyaddad Kholid. (2014) *Mengelola Kurikulum*. Jurnal Ilmiah Al-Ulum; Vol 3.
- Nugroho Heru. (2011) *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yatimin. (2009) *Desentralisasi Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam: Hikmah, Vol 1. No.1.
- Yamin Moh, (2013) *Ideologi & Kebijakan Pendidikan*. Malang: Madani.